

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik mengenai *Tata Kelola Alat Perlengkapan Dewan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 **Tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna** sudah berjalan sesuai prosedur, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek teknis, administrasi, dan sumber daya manusia.
- 2 **Aspek administrasi** sudah cukup tertata, namun distribusi dokumen sidang kadang terlambat sehingga memengaruhi efektivitas pembahasan agenda.
- 3 **Aspek teknis** masih menghadapi kendala, seperti gangguan perangkat suara dan keterbatasan sarana digital yang mendukung jalannya sidang.
- 4 **Aspek sumber daya manusia (SDM)** menunjukkan bahwa staf teknis dan tenaga pendukung masih terbatas, sehingga beban kerja menjadi kurang seimbang.
- 5 **Evaluasi pasca sidang** menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola, terutama dengan kebutuhan penerapan sistem digital (e-Paripurna) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mendukung prinsip *good governance*.

5.1 Saran

Agar tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna di DPRD Provinsi Lampung semakin optimal, maka disarankan:

- 1 **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan teknis, khususnya dalam pengelolaan perangkat digital, dokumentasi, dan pengarsipan berbasis elektronik.
- 2 **Pemanfaatan teknologi informasi** dengan mengembangkan sistem **e-Paripurna** guna mempercepat distribusi dokumen, mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak, serta mendukung transparansi.
- 3 **Pemeliharaan rutin sarana teknis** seperti mikrofon, LCD proyektor, dan sistem suara agar selalu siap digunakan dalam setiap sidang paripurna.

- 4 **Penguatan koordinasi** antara Bapemperda, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan agenda sidang paripurna dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 5 **Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)** yang lebih rinci terkait tata kelola alat perlengkapan sidang untuk meminimalisir hambatan teknis maupun administrasi.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung dapat berlangsung lebih profesional, efektif, dan mendukung fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.